

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Ghoffar, Abdul, 2009. *Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana: Jakarta
- Hikmat, H, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, humaniora, Bandung, 2004
- Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, CV Rajawali, Jakarta, 1993
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Filsafat Hukum, Problematik Ketertiban yang Adil*, Jakarta, Grasindo, 2004
- Kusumaatmadja, Mochtar, “*Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*”, dalam Otje Salman dan Eddy Damian (editor), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr. Mochtar Kusumaatmadja,S.H.,LL.M*, Bandung, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum, dan Pembangunan bekerja sama dengan Alumni, 2002
- Kusumaatmadja, “*Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*”, dalam Otje Salman dan Eddy Damian (editor)
- Mahfud, MD Moh, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988
- Natabaya, H.A.S, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2004
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, 1982
- Singarimbus, Mastri, Dkk, *Netode Penelitian Survey*, LP3ES, 1988, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, , *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1986
- Susanto, S Asrid, *Komunikasi Dalam Praktek*, PT. Bina Cipta, Bandung, 1974,
- Sumodiningrat, Gunawan, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*, PT. Gramedia, Jakarta, 1999

Suprijatna, T, *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000

Tjiptoherianto, Priyono, *Kemiskinan di Perkotaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993

Usman, S, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004

Van der Vlies I.C, *Bukum Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Handboek Wetgeving)*, alih bahasa: Linus Doludjawa, Jakarta, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005

([http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku\\_kepentingan](http://id.wikipedia.org/wiki/Pemangku_kepentingan))

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

Permendagri Nomor 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa

Permendagri Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa/Kelurahan

Permendagri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung-jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Kerjasama Desa

Permendagri Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Yogyakarta dan Lampung